



Harian Jogja (Hal.7/HLD)

Senin, 17 Maret 2025

► DANA DESA

20% DD Sudah Disiapkan untuk Ketahanan Pangan

BANTUL—Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMKal) Bantul masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) penggunaan Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Kepala DPMKal Bantul, Sri Nuryanti mengaku hingga saat ini belum ada juknis ihwal pengalokasian Dana Desa untuk ketahanan pangan.

"Ini yang masih kami tunggu, soal juknis [alokasi Dana Desa] untuk ketahanan pangan, apakah untuk beli bibit, pupuk, atau sarana penunjang pertanian dan peternakan," katanya,

► **Pemkab Bantul mengatakan bahwa sampai saat ini Dana Desa tahap pertama telah cair untuk seluruh kalurahan di Bantul.**

► **Lurah Seloharjo, Marhadi Badrun berharap agar alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat digunakan untuk pembuatan sumur bor.**

Minggu (16/3).

Dia mengaku seluruh kalurahan telah mengalokasikan 20% Dana Desa mereka untuk ketahanan pangan, tetapi lantaran juknis tersebut belum kunjung terbit, maka para lurah belum merealisasikan pengalokasian itu.

Nur, sapaan akrabnya, mengaku sampai saat ini Dana Desa tahap pertama

telah cair untuk seluruh kalurahan di Bantul. "Sesuai ketentuan kabupaten yang desanya berkategori mandiri maka pencarian [Dana Desa] dua tahap, yaitu triwulan I dan II sebesar 60 persen," katanya.

Kemudian, pada triwulan III mendatang, Dana Desa akan cair sebesar 40%. Dia pun berharap Dana Desa tersebut dapat menunjang program pembangunan di setiap kalurahan.

Diketahui, aturan pengalokasian Dana Desa untuk ketahanan pangan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.2/2024 dan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) No.3/2025.

Sementara itu, Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Marhadi Badrun berharap agar alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat

digunakan untuk pembuatan sumur bor di wilayahnya.

Pasalnya, wilayah Seloharjo selama ini lahan persawahan yang ada merupakan lahan sawah tadah hujan, sehingga pengairan di sana tergantung dari sumur bor atau pompa yang ada. Meski begitu, dia mengaku masih menunggu aturan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Kami menyesuaikan aturan untuk pelaksanaan [Dana Desa] 20 persen untuk ketahanan pangan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengatakan bahwa Permendes ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah hingga desa/kalurahan untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurutnya, Dana Desa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada 2025, sebanyak Rp71 triliun Dana Desa digelontorkan Pemerintah Pusat ke pemerintah desa/kalurahan. Sejak 2015 sampai saat ini total Dana Desa yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dari APBN ke pemerintah desa/kalurahan mencapai Rp610 triliun.

Dia menjabarkan fokus penggunaan Dana Desa 2025 sesuai dengan Permendes No. 2/2024 yakni, *Pertama*, penanganan kemiskinan ekstrem sebesar 15% untuk Bantuan Langsung Tunai; *kedua*, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan perubahan iklim; *ketiga*, peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan termasuk pencegahan *stunting*; dan yang *keempat*, yaitu dukungan untuk program ketahanan pangan atau swasembada pangan.